

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan ini didasari dari permintaan asesmen oleh Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto yang selanjutnya diregistrasi sebanyak 74 warga binaan pemsyarakatan dan dilaksanakan asesmen oleh Bapas Kelas I Padang. Pelaksanaan asesmen tersebut Bapas Kelas I Padang melakukan asesmen pembinaan awal dalam dua tahap. Pelaksanaan asesmen ini juga menggunakan beberapa instrumen yang penting bagi warga binaan Pemsyarakatan instrumen yang digunakan diantaranya instrumen *screening* penempatan narapidana (ISPN) untuk menentukan tingkat penempatan risiko lalu instrumen risiko residivis Indonesia (RRI) untuk mengantisipasi risiko pengulangan tindak pidana narkotika serta asesmen kebutuhan kriminogenik yang digunakan untuk mengetahui faktor kebutuhan yang tepat bagi warga binaan Pemsyarakatan di mana instrumen ini dilaksanakan untuk penilaian dan mengetahui terkait dengan risiko dan tindak pengulangan serta kebutuhan pembinaan. Rekomendasi pembinaan berupa kepribadian ataupun kemandirian tergantung tingkat risiko yang dihasilkan
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan di Lapas Narkotika Kelas III Sawathlunto diantaranya jarak yang jauh antara Bapas Kelas I Padang dengan Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto, jarak yang jauh tersebut akan menimbulkan biaya dan anggaran yang harus

dikeluarkan dalam pelaksanaan tersebut sehingga akan sulit untuk melakukan pelaksanaan secara berulang ke lokasi tersebut. Secara kode etik dari kepegawaian maka diperlukan surat tugas dan tidak etis jika pergi tanpa adanya surat tugas serta masih kurangnya koordinasi yang dilakukan antara Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto dengan Bapas Kelas I Padang. Faktor yang sangat mempengaruhi terkait dengan kendala di sini adalah tidak aktifnya pos Bapas di Sumatera Barat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa Lapas dan Bapas didirikan di setiap ibu kota kabupaten atau kotamadya, untuk mengantisipasi ini maka perlu diaktifkan pos Bapas karena tidak aktifnya pos Bapas tersebut mempengaruhi kemudian terhadap luas wilayah kerja yang harus ditangani oleh Bapas Kelas I Padang mencakup 11 wilayah kerja di Sumatera Barat. Adanya kendala atau hambatan yang dihadapi Bapas Kelas I Padang membuat tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan terhadap warga binaan Pemasyarakatan sehingga diperlukan upaya dan langkah nyata dalam mengatasi permasalahan tersebut.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan terhadap warga binaan khusus di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto ini adalah peningkatan koordinasi yang dilakukan antara Bapas dan Lapas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilangsungkan terhadap warga binaan pemasyarakatan serta untuk mengefisiensi dan membuat pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dari pembimbing kemasyarakatan lebih optimal adalah dengan pengaktifan pos Bapas dengan penetapan ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan karena dengan pengaktifan ini sendiri telah mengatasi hambatan seperti jarak yang jauh,

estimasi biaya yang dibutuhkan, koordinasi dan memperkecil lingkup kerja agar bisa terfokus pada 1 Lembaga Pemasarakatan. Adanya pos Bapas di Sumatera Barat akan sangat membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan mulai dari pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan klien Pemasarakatan.

B. SARAN

1. Agar pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan terhadap warga binaan khusus narkoba Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto oleh Bapas Kelas I Padang terlaksana secara optimal sebaiknya dari pemerintah dan kementerian dapat merealisasikan pendirian pos Bapas di setiap kabupaten kota agar dapat memaksimalkan tugas dan fungsi dari pembimbing kemasarakatan di Bapas sehingga dapat mengatasi dan meminimalisir kendala yang akan dihadapi oleh Bapas itu sendiri.
2. Kepada petugas pembimbing kemasarakatan dan petugas Lapas dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi sehingga terjalin Sinergi atau hubungan kerjasama yang baik dalam melakukan dan memberikan pelayanan terhadap warga binaan Pemasarakatan terkhusus di Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto agar kelak saat kembali ke masyarakat dapat diterima dengan layak karena terlaksananya dengan baik proses yang dilakukan terhadap warga binaan Pemasarakatan sehingga mendorong warga binaan untuk menjadi lebih baik dan siap kembali ke lingkungan masyarakat.
3. Semua pihak dan seluruh elemen lapisan masyarakat agar dapat memberikan pengaruh yang positif dan tidak memberikan tekanan terhadap warga binaan nantinya saat telah keluar dari lembaga pemasarakatan sebagai bentuk upaya memberikan dukungan agar warga binaan menjadi lebih baik.